

**EFEKTIFITAS PEMBIAYAAN
PEMBANGUNAN KEHUTANAN
DI TINGKAT UNIT PELAKSANA TEKNIS**



**DEPARTEMEN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA
JAKARTA 2007**

EFEKTIFITAS PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN KEHUTANAN DI TINGKAT UNIT PELAKSANA TEKNIS



DEPARTEMEN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA
JAKARTA 2007

**Efektifitas Pembiayaan Pembangunan Kehutanan
Di Tingkat UPT**

Disusun dan Diterbitkan Oleh :

**Biro Perencanaan dan Keuangan
Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan**



Tim Penyusun :

**Sudarsono Soedomo
M. Buce Saleh
Edje Djamhuri
Sudaryanto
Siswoyo
Omo Rusdiana
Cahyono Purwanto**

Kontributor :

**Agus Widiyono
Rahayu Riana
Munarto
Darto Wahab**

ISBN:

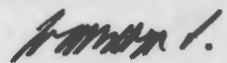
KATA PENGANTAR

Saat ini jumlah UPT yang berada di bawah Departemen Kehutanan mencapai 173, apabila dikelompokkan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya terbagi kedalam 17 kelompok UPT. Secara umum, setiap UPT mengemban lebih dari satu tupoksi. Namun, kedudukan satu tupoksi dengan tupoksi lainnya seringkali tidak setara. Satu tupoksiterlihat sebagaibagian dari tupoksi lainnya sehingga terjadi tumpangtindih tupoksi. Hal ini akan menyulitkan penyusunan program dan yang mungkin berujung pada komplikasi pertanggungjawaban administrasi keuangan.

Buku ini berusaha menyajikan hasil analisis dan model pelaksanaanUPT di lingkup Departemen Kehutanan agar lebih mampu melaksanakan kegiatannyr dengan baik.UPT sebagai lembaga organisasipublik relatif sulit diukur kinerjanya. Padahal sebuah lembaga organisasi publik selalu dituntut perbaikan kinerjanya. Empat tipe nilai perbaikan yang dapat diukur adalah nilai memperbaiki pengambilan keputusan; nilai memperbaiki keefektifan pelayanan; nilai memperbaiki efisiensi pelayanan; dan nilai organisasional dari usaha perbaikan dan pengukuran (Epstein, 1982). Seringkali sulit atau menyedatkan untuk menggunakan ukuran nilai rupiah atas perbaikan kinerja suatu UPT.

Mudah-mudahan penjelasan yang tertuang dalam buku ini, dapat diadopsi dan diimplementasikan oleh seluruh UPT Departemen Kehutanan dan sekaligus didorong oleh kebijakan dari semua Eselon I Departemen Kehutanan yang terkait. Semua ini tidak lain agar kinerja UPT mengalami peningkatan dan kehadirannya semakin dirasakan oleh publik.

Jakarta, November 2007
Kepala ^xBiro Perencanaan dan Keuangan



Wandojo Siswanto

Daftar Isi

Kata Pengantar. (i)

1	PENDAHULUAN	1
2	GAMBARAN UMUM UNIT PELAKSANA TEKNIS	5
2.1	Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi (BP2HP) Pontianak	6
2.1.1	Tupoksi, Program, dan Kegiatan	6
2.1.2	Sumberdaya	8
2.1.3	Kinerja	8
2.1.4	Masalah	8
2.2	Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Citarum-Ciliwung	8
2.2.1	Tupoksi, Program, dan Kegiatan	8
2.2.2	Sumberdaya	11
2.2.3	Kinerja	12
2.2.4	Masalah	13
2.3	Balai Besar Konservasi Sumberdaya Alam (BBKSDA) JABAR	13
2.3.1	Tupoksi, Program, dan Kegiatan	13
2.3.2	Sumberdaya	14
2.3.3	Kinerja	16
2.3.4	Masalah	16
2.4	Balai Besar Konservasi Sumberdaya Alam (BBKSDA) RIAU	18
2.4.1	Tupoksi, Program, dan Kegiatan	18
2.4.2	Sumberdaya	18
2.4.3	Kinerja	20
2.4.4	Masalah	20

2.5	Balai Besar Taman Nasional (BBTN)	
	Gede Pangrango	22
2.5.1	Tupoksi, Program, dan Kegiatan	22
2.5.2	Sumberdaya	23
2.5.3	Kinerja	24
2.5.4	Masalah	24
2.6	Balai Besar Taman Nasional (BBTN)	
	Bukit Barisan Selatan	25
2.6.1	Tupoksi, Program, dan Kegiatan	25
2.6.2	Sumberdaya	25
2.6.3	Kinerja	27
2.6.4	Masalah	27
2.7	Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Samarinda	28
2.7.1	Tupoksi, Program, dan Kegiatan	28
2.7.2	Sumberdaya	28
2.7.3	Kinerja	30
2.7.4	Masalah	31
2.8	Balai Penelitian Hutan Penghasil Serat (BPHPS) Kuok	31
2.8.1	Tupoksi, Program, dan Kegiatan	31
2.8.2	Sumberdaya	32
2.8.3	Kinerja	33
2.8.4	Masalah	33
2.9	Rangkuman Umum	34
3	PENDEKATAN UNTUK MENINGKATKAN KINERJA UPT	35
3.1	Pengantar	35
3.2	Pengertian-pengertian	36
3.3	Hal-hal Penting Pengukuran Kinerja	37
3.4	Model Nilai Pelayanan Publik	38
3.5	Tahapan Analisis	39
3.5.1	Pemilihan Outcome dan Indikator Outcome	39
3.5.2	Menghitung Score Outcome dan Keefektifan Biaya	40
3.5.3	Menyusun Matrik Nilai Pelayanan Publik	42
3.5.4	Menganalisis Hasil Kinerja Nilai Pelayanan Publik	43
4	BALAI PEMANTAUAN PEMANFAATAN HUTAN PRODUKSI (BP2HP): Contoh 1	44
4.1	Visi, Misi, dan Tupoksi	44
4.1.1	Visi	44
4.1.2	Misi	44
4.1.3	Tupoksi	45
4.2	Outcome	45
4.3	Indikator	47
4.4	Kegiatan Utama yang Dibutuhkan	50
4.5	Sumberdaya Manusia, Sarana dan Prasarana	52

4.6	Penghitungan Skor Outcome	53
4.7	Penghitungan Skor Biaya	56
4.7.1	Nilai Sarana dan Prasarana	56
4.7.2	Biaya Operasional Tahunan	56
4.8	Penghitungan Keefektifan Biaya	56
5	BALAI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI: Contoh 2	58
5.1	Tupoksi	58
5.2	Outcome	59
5.3	Indikator	61
5.4	Kegiatan Utama yang Dibutuhkan	65
5.5	Sumberdaya Manusia, Sarana dan Prasarana	66
5.6	Penghitungan Skor Outcome	67
5.7	Penghitungan Skor Biaya	68
5.7.1	Nilai Sarana dan Prasarana	68
5.7.2	Biaya Operasional Tahunan	70
5.8	Penghitungan Keefektifan Biaya	70
6	CONTOH-CONTOH TERBATAS	72
6.1	Balai Persuteraan Alam	72
6.1.1	Outcome	72
6.1.2	Indikator	73
6.1.3	Kegiatan Utama	75
6.2	Balai Perbenihan Tanaman Hutan (BPTH)	81
6.2.1	Outcome	81
6.2.2	Indikator	82
6.2.3	Kegiatan Utama	83
6.3	Balai Konservasi Sumberdaya Alam	85
6.3.1	Outcome	85
6.3.2	Indikator	89
6.3.3	Kegiatan Utama	91
	DAFTAR PUSTAKA	101

Daftar Gambar

3.1 Model Nilai Pelayanan Publik (Martin dan Parston, 2006)	39
3.2 Hubungan antara Nilai dan Conformance (Fahy, Roche, dan Weiner, 2005)	40
3.3 Matrik Kinerja Nilai Pelayanan Publik	43
3.3.1 Analisis Perbandingan Pelayanan	43
3.3.2 Analisis Kegiatan SPVNS Cianjur - Caringu Tahun 2006	43
3.3.3 Analisis Biaya Pelaksanaan Kegiatan pada BKKSDA Jabar	43
3.3.4 Analisis Kegiatan BKKSDA Jabar Tahun 2006	43
3.3.5 Analisis Biaya Pelaksanaan Kegiatan pada BKKSDA Bk	43
3.3.6 Analisis Kegiatan pada BKKSDA Bk	43
3.3.7 Analisis Biaya Pelaksanaan Kegiatan pada Balai Besar	43
3.3.8 Analisis Kegiatan Balai Besar INGF Tahun 2006	43
3.3.9 Analisis Biaya Pelaksanaan Kegiatan pada BPPN Bukit	43
3.3.10 Analisis Kegiatan pada BPPN Bukit Barisan Selatan	43
3.3.11 Analisis Biaya Pelaksanaan Kegiatan pada BPPN Wila-	43
3.3.12 Analisis Kegiatan BPPN Wilayah IV Sumatera Utara	43
3.3.13 Analisis Biaya Pelaksanaan Kegiatan pada BPPN Sukh	43
3.3.14 Analisis Kegiatan BPPN Sukh Tahun 2007	43
3.3.15 Analisis Biaya Pelaksanaan Kegiatan pada BPPN	43
3.3.16 Analisis Kegiatan BPPN dan BPPN	43
3.3.17 Analisis Biaya Pelaksanaan Kegiatan pada BPPN	43

Daftar Tabel

2.1	Anggaran Biaya Pelaksanaan Kegiatan pada BP2HP Pontianak Berdasarkan Tupoksinya	7
2.2	Realisasi Kegiatan BP2HP Pontianak Tahun 2006	9
2.3	Anggaran Biaya Pelaksanaan Kegiatan pada BPDAS Citarum - Ciliwung Berdasarkan Tupoksinya	10
2.4	Realisasi Kegiatan BPDAS Citarum - Ciliwung Tahun 2006	12
2.5	Anggaran Biaya Pelaksanaan Kegiatan pada BBKSDA Jabar Berdasarkan Tupoksinya	15
2.6	Realisasi Kegiatan Balai Besar BKSDA Jabar Tahun 2006	17
2.7	Komponen Biaya Pelaksanaan Kegiatan pada BBKSDA Riau Berdasarkan Tupoksinya	19
2.8	Realisasi Kegiatan pada BBKSDA Riau	21
2.9	Anggaran Biaya Pelaksanaan Kegiatan pada Balai Besar TNGP Berdasarkan Tupoksinya	23
2.10	Realisasi Kegiatan Balai Besar TNGP Tahun 2006	24
2.11	Komponen Biaya Pelaksanaan Kegiatan pada BBTN Bukit Barisan Selatan Berdasarkan Tupoksinya	26
2.12	Realisasi Kegiatan pada BBTN Bukit Barisan Selatan	27
2.13	Komponen Biaya Pelaksanaan Kegiatan pada BPKH Wilayah IV Samarinda Berdasarkan Tupoksinya	29
2.14	Realisasi Kegiatan BPKH Wilayah IV Samarinda Tahun 2006	30
2.15	Anggaran Biaya Pelaksanaan Kegiatan pada BPHPS Kuok Berdasarkan Tupoksinya	32
2.16	Realisasi Kegiatan BPHPS Kuok Tahun 2007	33
4.1	Outcome dari BP2HP dan Bobotnya	46
4.2	Justifikasi Masing-Masing Outcome dari BP2HP	48

4.3	Daftar Indikator untuk masing-masing Outcomes pada UPT BP2HP	49
4.4	Kegiatan Utama yang Dibutuhkan untuk masing-masing Outcomes pada UPT BP2HP	51
4.5	Kebutuhan Sumberdaya Manusia, Sarana dan Prasarana oleh UPT BP2HP	53
4.6	Contoh Perhitungan Skor Outcome pada UPT BP2HP . . .	54
4.7	Contoh Perhitungan Normalisasi Biaya Operasional pada UPT BP2HP Tahun 2006	57
4.8	Contoh Perhitungan Biaya Efektif pada UPT BP2HP Tahun 2006	57
5.1	Justifikasi Masing-masing Outcomes pada UPT Balai Pengelolaan DAS	60
5.2	Pembobotan Outcomes pada masing-masing Balai Pengelolaan DAS	61
5.3	Daftar Indikator untuk Masing-masing Outcomes pada UPT Balai Pengelolaan DAS	62
5.4	Kebutuhan Sumberdaya Manusia, Sarana dan Prasarana oleh UPT BPDAS	67
5.5	Contoh Perhitungan Skor Outcome pada UPT BPDAS . . .	69
5.6	Contoh Perhitungan Normalisasi Biaya Operasional pada UPT BPDAS Tahun 2006	70
5.7	Contoh Perhitungan Biaya Efektif pada UPT BPDAS Tahun 2006	71
6.1	Outcome dari BP2HP dan Bobotnya	73
6.2	Justifikasi Masing-masing Outcomes pada UPT Balai Perhuteraan Alam	74
6.3	Daftar Indikator untuk masing-masing Outcomes pada UPT BP2HP	76
6.4	Outcome dari Balai Perbenihan Tanaman Hutan dan Bobotnya	82
6.5	Justifikasi Masing-masing Outcomes pada Balai Perbenihan Tanaman Hutan	83
6.6	Daftar Indikator untuk masing-masing Outcomes pada Balai Perbenihan Tanaman Hutan	84
6.7	Justifikasi Masing-Masing Outcome dari Balai Konservasi Sumberdaya Alam	87
6.8	Pembobotan Skor Outcomes pada masing-masing Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Buru dan Taman Wisata Alam Berdasarkan Tipologi Aspek Ekologi	90
6.9	Daftar Indikator untuk masing-masing Outcomes pada Balai Konservasi Sumberdaya Alam	92



PENDAHULUAN

Kegiatan pembangunan kehutanan merupakan bagian dari proses kegiatan pembangunan nasional yang dilaksanakan dalam sektor, program dan proyek untuk mencapai tujuan dan visi pembangunan kehutanan. Dengan demikian, kegiatan pembangunan kehutanan tidak harus selalu kegiatan yang berada langsung dalam kewenangan Departemen Kehutanan. Ada kegiatan penunjuang di luar kewenangan Departemen Kehutanan yang diperlukan sebelum kegiatan kehutanan dapat dilaksanakan. Disinilah perlunya suatu koordinasi demi mewujudkan keterpaduan dan efisiensi. Buku ini akan membatasi diri hanya pada pembangunan kehutanan yang berada dalam lingkup Departemen Kehutanan yang dilaksanakan melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT).

Pembangunan kehutanan dilaksanakan di 33 Provinsi di Indonesia dengan program-program yang diarahkan untuk: (1) Memperluas lapangan kerja, (2) Mengembangkan mutu Sumberdaya Manusia, (3) Menunjang program sosial, (4) Memperluas dan meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat, (5) Menyelesaikan pembangunan sarana prasarana yang mendukung kegiatan ekonomi masyarakat, (6) Menjaga/meningkatkan efisiensi sarana prasarana yang telah dibangun, (7) Mendukung upaya pelestarian sumberdaya alam dan fungsi lingkungan hidup, (8) Memanfaatkan dan menguasai teknologi, (9) Meningkatkan dan mengoptimalkan penggunaan produksi dalam negeri,